



## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEMISKINAN DI DAERAH KABUPATEN: KASUS KABUPATEN BONE

*Analysis of Poverty Factors in Regency Area: Case Study of Bone Regency*

Juhasni Bahar<sup>1\*</sup>, Agussalim<sup>2</sup>, Retno Fitrianti<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup>Program Sarjana Departemen Ilmu  
Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis, Universitas Hasanuddin.  
Email: juhasnibahar@gmail.com

<sup>2</sup>Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas  
Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas  
Hasanuddin.  
Email: agus.jerox@gmail.com

<sup>3</sup>Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas  
Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas  
Hasanuddin.

**Keywords:** Poverty Rate, per capita  
GDRP, Minimum Wages, Inflation

**Kata kunci:** Tingkat Kemiskinan,  
PDRB perkapita, Upah Minimum,  
Inflasi

### Abstract

This study aims to determine and analyze the effect of per capita GRDP, minimum wages and inflation rates on poverty in Bone Regency. Problems faced by Bone Regency in 2017 where the poverty level of Bone Regency was rank 10th among Regencies / Cities in South Sulawesi. The method used in this research was the method of multiple linear regression analysis using secondary data from 2000-2017 in Bone Regency sourced from Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulawesi Selatan and Badan Pusat Statistik (BPS). The data was processed by computer software (IBM SPSS). The results of this study indicate that 83.0% can explain variations in changes in poverty levels in Bone Regency. The remaining 17.0% was determined by variables or other factors outside the model. Partially per capita GDRP and inflation were positive and insignificant towards the level of poverty in Bone Regency while the minimum wage had a negative and significant effect on the level of poverty in Bone Regency.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh PDRB perkapita, upah minimum dan tingkat inflasi terhadap kemiskinan di Kabupaten Bone. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bone pada tahun 2017 dimana tingkat kemiskinan Kabupaten Bone berada pada peringkat ke-10 diantara Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda menggunakan data sekunder dari tahun 2000-2017 di Kabupaten Bone yang bersumber dari Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Sulawesi Selatan dan Badan pusat statistik (BPS). Data tersebut diolah

menggunakan software komputer (IBM SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan sebesar 83.0% dapat menjelaskan variasi perubahan tingkat kemiskinan Kabupaten Bone. Sisanya sebesar 17.0% ditentukan oleh variabel atau faktor lain di luar model. Secara Parsial PDRB perkapita dan inflasi positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone sedangkan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone.

## PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk 2008).

Kesejahteraan masyarakat sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang bersifat multidimensional dan merupakan bagian yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Kemiskinan tidak hanya terjadi di Kota saja namun kemiskinan juga terjadi di Pedesaan.

kemiskinan dapat dikatakan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keluarga seperti makan, minum, tempat berlindung, pakaian, pendidikan dan kesehatan. Secara umum, kemiskinan disebabkan karena kebutuhan manusia yang bermacam-macam, adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, hal ini terlihat bahwa mayoritas penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah yang terbatas.

Proses ini berlangsung secara timbal balik dan saling terkait, yang pada akhirnya secara akumulatif memperlemah masyarakat miskin. Masalah ini jika tidak segera di tanggulangi akan memperparah kondisi masyarakat miskin, yang berdampak pada lemahnya etos kerja, rendahnya daya perlawanan terhadap berbagai persoalan hidup, kebiasaan-kebiasaan buruk yang terpaksa mereka lakukan sebagai jalan pintas untuk mempertahankan hidup mereka, apabila keadaan ini berkelanjutan, maka akan melahirkan budaya kemiskinan yang sulit untuk diberantas.

Berbagai kebijakan, strategi dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan baik dalam skala nasional maupun lokal (Ernawati, 2012). Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dapat

dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin serta hampir miskin dan mengurangi beban biaya bagi rumah tangga yang sangat miskin (Mahsunah, 2013).

Permasalahan strategis di pemerintahan Kabupaten Bone tidak jauh berbeda dengan pemerintahan pusat, yakni permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bone adalah permasalahan sosial dimana pada tahun 2017 kabupaten Bone masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Pada tahun 2017 Kabupaten Bone berada diperingkat ke-10 tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan dengan tingkat Penduduk Miskin sebesar 10,27% dengan jumlah penduduk sebesar 77.130 jiwa. Pada tahun 2017 Kabupaten Bone, tingkat kemiskinannya mengalami kenaikan sebesar 10,27% yang pada tahun 2016 tingkat kemiskinannya hanya sebesar 10,07%. Berikut Tabel 1 Menunjukkan perbandingan presentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sul-Sel tahun 2017.

**Tabel 1.** Perbandingan Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Penduduk miskin (%)
1	Pangkajene dan Kepulauan	16,19
2	Jeneponto	15,38
3	Toraja Utara	12,60
4	Luwu Utara	14,38
5	Luwu	13,98
6	Selayar	13,25
7	Enrekang	13,14
8	Tana Toraja	12,60
9	Maros	11,11
10	Bone	10,27
11	Barru	9,70
12	Bantaeng	9,65
13	Sinjai	9,22
14	Takalar	9,21
15	Palopo	8,73
16	Pinrang	8,44
17	Soppeng	8,28
18	Gowa	8,00
19	Bulukumba	7,96
20	Luwu Timur	7,62
21	Wajo	7,38
22	Pare-pare	5,68
23	Sidenreng Rappang	5,31
24	Makassar	4,85

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone (2017)*

Kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat, maka dari itu pemerintah melakukan berbagai macam program penanggulangan kemiskinan seperti bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan beras miskin (RASKIN), keluarga harapan, bantuan

langsun tunai (BLT), dan ,masih banyak lainnya yang diharapkan agar menurunkan angka kemiskinan.

Upaya pemberantasan kemiskinan suatu wilayah secara umum dapat dilihat dari perkembangan tingkat kemiskinan penduduk. Tingkat kemiskinan suatu wilayah mencakup besaran jumlah dan persentase dari penduduk miskin. Meskipun angka kemiskinan merupakan suatu pendekatan makro terhadap kesejahteraan penduduk, tetapi angka kemiskinan merupakan indikator yang paling tepat untuk menganalisis keberadaan penduduk miskin dalam wilayah tersebut. Berikut tabel 2 jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Bone tahun 2012-2017.

**Tabel 2.** Jumlah Dan Presentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Bone 2012-2017

No	Tahun	Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase
1	2012	89.530	12,25
2	2013	87.680	11,92
3	2014	80.460	10,88
4	2015	75.010	10,12
5	2016	75.090	10,07
6	2017	77.130	10,27

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone (2017)*

Tabel 2 menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Bone, data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone menunjukkan bahwa pada periode 2012-2015 terlihat adanya tren penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin. Namun, pada tahun 2016 terjadi sedikit peningkatan jumlah penduduk miskin secara absolut. Kemudian pada tahun 2017 kemiskinan kembali meningkat baik dari sisi jumlah absolut penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Selama periode 2012-2017, ini pertama kalinya persentase penduduk miskin mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 kemiskinan di Kabupaten Bone mencapai 77,13 juta jiwa atau sebesar 10,27 persen dari total penduduk Kabupaten Bone. Apabila ditinjau pada level provinsi, maka pada tahun 2017, dari seluruh penduduk miskin yang ada di Sulawesi Selatan, sekitar 9,49 persennya tinggal di Kabupaten Bone.

Naiknya jumlah penduduk miskin di kabupaten Bone pada tahun 2017 sejalan dengan pertumbuhan penduduk, sumber daya yang tidak merata, kemampuan penerimaan dan pengeluaran yang tidak seimbang dengan pendapatan masyarakat, serta mentalitas kerja yang masih perlu ditingkatkan terutama generasi muda. Hal ini merupakan satu tantangan bagi pemerintah Kabupaten Bone untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengupayakan pembangunan untuk tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin tingginya komitmen pemerintah untuk menaggulangi kemiskinan diharapkan jumlah penduduk miskin pada tahun-tahun berikutnya dapat terus menurun sejalan dengan kebijakan pemerintah dan komitmen untuk menurunkan penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi merupakan dampak dari

pembangunan dibidang ekonomi disamping bidang-bidang yang lainnya seperti, sosial, budaya, politik dan keamanan. Khususnya dibidang ekonomi, nilai tambah yang dihasilkan oleh bidang ekonomi secara tidak langsung menggambarkan tingkat pembangunan yang dicapai pada suatu daerah. Bagi daerah Kabupaten Bone hal ini sangatlah perlu agar menjadi acuan untuk pembangunan berikutnya yang lebih baik.

Salah satu yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat dan keberhasilan pembangunan disuatu daerah ditinjau dari sisi ekonominya, meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan disuatu wilayah, Pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Kabupaten Bone menjelaskan bahwa pemerintah mampu mengatasi atau menekan tingkat kemiskinan. Namun pada kenyataannya meningkatnya Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone pada tahun 2017 tidak menurunkan Jumlah penduduk miskin, namun pada tahun 2017 tingkat penduduk miskin di Kabupaten Bone ikut meningkat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan pendapatan yang dihasilkan melalui barang dan jasa oleh semua kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu, semakin tinggi PDRB disuatu wilayah, maka semakin besar pula tingkat penerimaan suatu wilayah tersebut. Pertumbuhan PDRB perkapita suatu daerah dapat digunakan sebagai salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. PDRB perkapita merupakan proyeksi indikator untuk menentukan tingkat PDRB perkapita disuatu wilayah. Pendapatan dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bone dari tahun 2012-2017 setiap tahunnya mengalami kenaikan berdasarkan harga berlaku. Tabel 3 menyajikan data pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita Kabupaten Bone tahun 2012-2017.

**Tabel 3.** Laju Pertumbuhan Dan PDRB Perkapita Di Kabupaten Bone Tahun 2012-2017

No.	Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB Perkapita ( Rupiah)
1	2012	8,21	20.354.532
2	2013	6,30	22.794.951
3	2014	9,53	26.901.207
4	2015	8,30	31.382.860
5	2016	9,06	35.210.155
6	2017	8,43	39.153.632

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone (2017).*

Berdasarkan Tabel 3 laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bone dari tahun 2012-2017 Menggambarkan kondisi dimana suatu keadaan laju pertumbuhan perekonomian mengalami fluktuasi. Dimana ada kalanya pertumbuhan perekonomian mengalami peningkatan dan penurunan, namun pada tabel diatas menunjukkan peningkatan laju perekonomian tertinggi pada tahun 2014 dan laju pertumbuhan terendah pada tahun 2013. Sedangkan PDRB perkapita Kabupaten Bone dari tahun ketahun mengalami kenaikan terus menerus pada PDRB perkapita, besarnya nilai PDRB

perkapita Kabupaten Bone pada tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menggambarkan bahwa perekonomian Kabupaten Bone masih sangat bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, artinya ketika sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan, maka dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bone. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menopang sebagian besar ekonomi rumah tangga di Kabupaten Bone.

Selain PDRB perkapita kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan peraturan menteri tenaga kerja Nomor : Per-01/Men/1999, Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah adalah kebijakan yang diterapkan dengan tujuan sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak dieksploitasi dalam bekerja dan mendapat upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM). Jika kebutuhan hidup minimum dapat terpenuhi maka kesejahteraan pekerja meningkat dan terbebas dari masalah kemiskinan. Tabel 4 menunjukkan upah minimum Kabupaten Bone tahun 2012-2017.

**Tabel 4.** Upah Minimum Kabupaten Bone Tahun 2012-2017

No.	Tahun	Upah Minimum (Rupiah)
1	2012	1.200.000
2	2013	1.440.000
3	2014	1.800.000
4	2015	2.000.000
5	2016	2.250.000
6	2017	2.435.625

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan (2017)*

Dari Tabel 4 menunjukkan bahwa dari tahun 2012-2017 tingkat upah minimum Kabupaten Bone terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan upah minimum didasari dengan pertimbangan-pertimbangan seperti kebutuhan hidup layak (KHL) pekerjaannya dan tingkat upah yang berkeadilan baik dari sisi buruh maupun pengusaha.

Upah yang diberikan ternyata secara riil nilainya sangat rendah meskipun secara nominal nilainya cukup tinggi. Penetapan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah secara tidak sadar telah membuat para pekerja berada dalam kondisi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin hari mengalami fluktuasi harga (Inflasi).

Selain faktor-faktor di atas adapula yang berpengaruh terhadap kemiskinan yaitu inflasi. Inflasi merupakan perkembangan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara, inflasi sering terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar dalam masyarakat lebih besar dibandingkan dengan jumlah barang atau jasa yang tersedia. Inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat

kemiskinan, semakin meningkatnya inflasi maka akan meningkatkan harga kebutuhan barang dan jasa, meningkatnya harga kebutuhan barang dan jasa akan menurunkan daya beli masyarakat, sehingga akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Tabel 5. menyajikan data Laju inflasi di Kabupaten Bone tahun 2012-2017.

**Tabel 5.** Tingkat Inflasi Kabupaten Bone Tahun 2012-2017

No	Tahun	Tingkat Inflasi (%)
1	2012	3,65
2	2013	6,86
3	2014	8,22
4	2015	0,97
5	2016	1,48
6	2017	5,54

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone (BPS) (2017)*

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa Sejak tahun 2012 sampai tahun 2017, pergerakan inflasi di Kabupaten Bone cukup berfluktuasi. Mulai tahun 2012 hingga tahun 2014 laju inflasi di Kabupaten Bone terus mengalami kenaikan dari 3,65 persen, 6,86 persen, dan puncaknya pada tahun 2014 terjadi inflasi sebesar 8,22 persen. Peningkatan laju inflasi pada tahun 2013 dan 2014 ini disebabkan karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang cukup tinggi yaitu dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 pada 21 Juni 2013 dan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 pada 17 November 2014. Di tahun 2016 dan 2017 harga BBM juga mengalami kenaikan meski tidak signifikan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka identifikasi rumusan masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut: Apakah PDRB perkapita, upah minimum dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Bone dan seberapa besar pengaruh PDRB perkapita, upah minimum dan tingkat inflasi terhadap kemiskinan di Kabupaten Bone?

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah yang telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu, konkrit/empiris, objektif, rasional dan sistematis. Metode Kuantitatif berasal dari data yang berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Metode ini biasanya digunakan untuk membuktikan atau menolak suatu teori.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bone secara keseluruhan yang mencakup tingkat kemiskinan Kabupaten Bone. Variabel yang diteliti meliputi variabel PDRB perkapita, upah minimum dan inflasi yang mempengaruhi variabel tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data tingkat Kemiskinan, data PDRB perkapita, data upah minimum dan data inflasi data tersebut diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone dan dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data PDRB perkapita, data upah minimum, dan data inflasi yang bersifat runtut waktu tahunan (*time series*) dari 2000-2017. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data ini biasa diperoleh melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis, yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumentar yang dipublikasikan. Data sekunder juga diartikan sebagai data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan jurnal.

Data dalam penelitian ini berupa data tingkat kemiskinan, data PDRB perkapita, upah minimum dan data inflasi tersebut diperoleh melalui badan pusat statistik (BPS) Kabupaten Bone dan dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Metode Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Untuk melengkapi data dan informasi dalam penyusunan skripsi ini dilakukan pengumpulan data studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca laporan, dokumen, teori, artikel, atau jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengolahan data dengan menggunakan program komputer IBM SPSS Statistic dengan terlebih dahulu melakukan pemindahan data yang diperoleh dari dalam software Microsoft Excel.

Dalam menganalisis besarnya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan model ekonometrika dengan meregresikan variabel-variabel yang ada dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*.

Fungsi matematikanya adalah sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3) \dots\dots\dots(1)$$

Kemudian fungsi di atas ditransformasikan ke dalam model persamaan regresi

$$e^y = \beta_0 X_1^{\beta_1} X_2^{\beta_2} e^{(\beta_3 X_3 + \mu)} \dots\dots\dots(2)$$

$$y = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \dots\dots\dots(3)$$

Dimana:

Y = Tingkat penduduk miskin (%)

B<sub>0</sub> = Konstanta

X<sub>1</sub> = Pendapatan Perkapita (Rp)

X<sub>2</sub> = Upah Minimum (Rp)

X<sub>3</sub> = Inflasi (%)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien Regresi

$\mu$  = Error Term (5%)

Untuk mengetahui pengaruh secara langsung maka dilakukan analisis regresi linier berganda, syarat yang diperlukan sebelum melakukan analisis regresi berganda adalah dengan melakukan Uji Asumsi Klasik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Perkembangan Variabel Penelitian*

#### *Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kab. Bone*

Kemiskinan dalam penelitian ini dilihat dari persentase penduduk miskin di Kabupaten Bone tahun 2000-2017. Kemiskinan berarti sejumlah penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang telah ditetapkan oleh suatu badan atau orang tertentu dan perhitungan yang dilakukan oleh badan atau organisasi tersebut digunakan sebagai standar perhitungan untuk menentukan jumlah kemiskinan yang ada di suatu daerah. Atau singkatnya, penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, garis kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS). Sebelum melihat presentase tingkat kemiskinan ada baiknya mengetahui jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Bone sebagai berikut:

**Tabel 6.** Penduduk Miskin dan Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone tahun 2000-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa/org)	Tingkat kemiskinan (%)
2000	17.430	26.90
2001	17.430	26.90
2002	11.150	17.0
2003	112.600	16.60
2004	107.500	15.70
2005	114.200	16.38
2006	130.900	18.78
2007	131.600	18.84
2008	121.900	17.35
2009	107.270	15.19
2010	101,010	14.08
2011	92.075	12.67
2012	89.530	12.25
2013	87.680	11.92
2014	80.460	10.88
2015	75.010	10.12
2016	75.090	10.07
2017	77.130	10.27

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone (diolah)*

Penurunan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang meningkat lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk miskin dan tidak terlepas dari adanya program pengentasan kemiskinan. Seperti yang dapat dilihat melalui tabel jumlah penduduk miskin diatas pada tahun 2000-2006 mengalami fluktuasi sedangkan dari tahun 2007-2017 jumlah penduduknya mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2015-2017 penurunannya tidak terlalu besar tetapi tetap saja program pengentasan kemiskinan berjalan dengan cukup baik. Selanjutnya kita dapat melihat kondisi presentase tingkat kemiskinan yang di terjadi di kabupaten Bone dan yang merupakan data yang digunakan dalam perhitungan SPSS ini.

Secara umum persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone pada tahun 2000-2006 cenderung berfluktuasi sedangkan pada tahun 2007-2017 cenderung mengalami penurunan, tetapi di tahun 2014 sampai 2017 pertumbuhannya tetap berada di 10 persen, dan di tahun 2017 tingkat kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bone kembali mengalami peningkatan sebesar 0.43 persen meskipun peningkatannya tidak terlalu besar namun itu juga dapat menyebabkan masalah jika dibiarkan begitu saja. Sehingga dengan kondisi demikian diharapkan pemerintah lebih memperhatikan lagi penanganan mengenai masalah kemiskinan agar tingkat kemiskinan tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya.

### ***Perkembangan PDRB perkapita di Kab. Bone***

Suatu daerah yang memiliki PDRB perkapita yang tinggi umumnya memiliki *standard of living* yang juga tinggi. Perbedaan pendapatan mencerminkan perbedaan kualitas hidup: Negara kaya (dicerminkan oleh pendapatan perkapita yang tinggi) memiliki kualitas hidup yang lebih baik (dicerminkan oleh, antara lain, angka harapan hidup, tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan) dibandingkan dengan negara miskin. Selain itu, kenaikan dalam pendapatan perkapita merupakan pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Menuru Mankiw (2005), faktor utama yang mempengaruhi perbedaan *standard of living* (ditunjukkan oleh perbedaan besar pendapatan perkapita) antara negara kaya dan negara miskin adalah tingkat produktivitas. Produktivitas mengacu pada jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh seorang pekerja dalam setiap jam. Dengan demikian, suatu negara dapat menikmati *standard of living* yang tinggi jika negara tersebut dapat memproduksi barang dan jasa dalam jumlah besar. Tabel 7 menyajikan perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Bone Tahun 2000-2017.

**Tabel 7.** PDRB Perkapita Kabupaten Tahun 2000-2017

<b>Tahun</b>	<b>PDRB per kapita (Rp)</b>
2000	3.072.357
2001	3.484.280
2002	3.989.094
2003	4.252.700
2004	4.328.924
2005	4.792.831
2006	5.541.502
2007	6.310.934
2008	7.579.164
2009	9.009.718
2010	10.492.627
2011	12.188.533
2012	20.354.532
2013	22.7944.951
2014	26.901.207
2015	31.382.860
2016	35.210.155
2017	39.153.623

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone (diolah) (2017)*

Berdasarkan Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Bone sejak tahun 2000-2017 PDRB perkapita Kabupaten Bone mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Besarnya nilai PDRB perkapita Kabupaten Bone pada tahun 2017 didominasi oleh sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan yang menggambarkan bahwa perekonomian Kabupaten Bone masih sangat bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, artinya ketika sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan, maka dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bone. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menopang sebagian besar ekonomi rumah tangga di kabupaten Bone.

### ***Perkembangan Upah Minimum di Kab. Bone***

Dalam perumusan Upah Minimum Pemerintah Daerah membentuk dewan pengupahan yang beranggotakan dari wakil pemerintah, kantor/dinas, unit terkait, organisasi serikat pekerja, organisasi 33 pengusaha, dan akademisi. Dewan pengupahan berfungsi melakukan survei dan pendataan harga-harga bahan pokok di daerah sekitarnya, dalam komponen kelompok-kelompok kebutuhan hidup layak yang antara lain meliputi komponen sandang, pangan, perumahan, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan tabungan. Setelah data terhimpun kemudian dikaji, dihitung, dan dianalisa apakah perusahaan-perusahaan mampu membayar kenaikan yang akan ditetapkan. Kebijakan diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan inflasi, dan faktor-faktor lain. Tabel 8 menyajikan perkembangan upah minimum Kabupaten Bone tahun 2000-2017.

**Tabel 8.** Upah Minimum Kabupaten Bone Tahun 2000-2017

<b>Tahun</b>	<b>Upah Minimum (Rp)</b>
2000	213.700
2001	300,000
2002	375,000
2003	415,000
2004	455,000
2005	510,000
2006	612,000
2007	673,200
2008	740,000
2009	905,000
2010	1,000,000
2011	1,100,000
2012	1,200,000
2013	1,440,000
2014	1,800,000
2015	2,000,000
2016	2,250,000
2017	2,435,625

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Sul-Sel (2017)*

Berdasarkan Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa perkembangan Upah minimum di Kabupaten Bone sejak tahun 2000-2017 cenderung meningkat dimana pada tahun 2000 sebesar Rp 213.700 angka ini meningkat menjadi Rp. 2.435.625 ditahun 2017. Kenaikan upah minimum dari tahun ke tahun didasari dengan pertimbangan-pertimbangan seperti kebutuhan hidup layak (KHL) pekerjanya dan tingka upah yang berkeadilan baik dari sisi buruh maupun pengusaha. Upah yang diberikan ternyata secara riil nilainya sangat rendah meskipun secara nominal nilainya cukup tinggi dan kenaikan upah akan meningkatkan tingkat daya beli pekerja meningkat, konsumsi pekerja sehingga pekerja bisa merasakan kesejahteraan dan upah minimum berlaku untuk semua pekerja yang ada di Kabupaten Bone, baik bekerja di instansi swasta, Pemerintahan, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.

### ***Perkembangan Inflasi***

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus-menerus sepanjang waktu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya. (Badan Pusat Statistik).

Perkembangan inflasi di Kabupaten Bone dari tahun 2000-2017 menunjukkan angka yang berfluktuasi yaitu tingkat Inflasi tertinggi di Kabupaten Bone yaitu pada tahun 2008 yang sebesar 14,22 persen dan angka tersebut merupakan inflasi sedang dan inflasi sedang kedua pada tahun 2002 yaitu sebesar 10,04 persen, kemudian inflasi terendah atau inflasi tingkat rendah berada pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,97 persen.

**Tabel 9.** Tingkat Inflasi Kabupaten Bone Tahun 2000-2017

<b>Tahun</b>	<b>Inflasi (%)</b>
2000	7,69
2001	9,31
2002	10,04
2003	5,78
2004	5,86
2005	7,11
2006	6,74
2007	7,85
2008	14,22
2009	6,84
2010	6,73
2011	3,98
2012	3,65
2013	6,86
2014	8,22
2015	0,97
2016	1,5
2017	5,54

*Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah (2017)*

Angka inflasi Kabupaten Bone pada tahun 2017 sebesar 5,54 persen, angka tersebut relatif jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 1,5 persen. Sedangkan pada tahun 2014 mengakibatkan terjadi inflasi tahunan sebesar 8,22 persen. Kenaikan harga pada akhir tahun itu terjadi pada kelompok bahan makanan yaitu 16,07 persen dan terendah adalah kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga yaitu 0,96 persen. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang cukup tinggi yaitu dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 pada 21 Juni 2013 dan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 pada 17 November 2014 yang secara langsung mengakibatkan kenaikan biaya transportasi dan memicu kenaikan komoditi lain. Di tahun 2016 dan 2017 harga BBM juga mengalami kenaikan meski tidak signifikan. Sedangkan inflasi terbesar terjadi pada tahun 2008, inflasi tahun 2008 disebabkan oleh kelompok bahan sandang/pakaian sebesar 30,56 persen dan terendah adalah kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 5,11 persen.

## **Hasil Penelitian**

### ***Hasil Uji Statistik***

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda mengenai analisis faktor-faktor kemiskinan di kabupaten Bone tahun 2000-2017. Adapun hasil estimasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 10.** Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	Std.error	T-statistik	probalita
constant	92,123	13,021	7,075	0,000
LnX1	4,126	3,043	1,356	0,197
LnX2	-10,610	3,605	-2,410	0,011
X3	0,230	0,216	0,754	0,303
*)Signifikan $\alpha=5\%$ ; $R^2=0.830$ ; F-statistik=22.795 Prob(F-statistik)= 0.000				

Sumber : data diolah dengan program SPSS

Persamaan linear regresi berganda antara PDRB perkapita (X1), upah minimum (X2) dan inflasi (X3) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) di Kabupaten Bone tahun 2000-2017. Dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 92,123 + 4,126X_1 - 10,610X_2 + 0,230$$

$$t = (7,075)^* (1,356) (-2,943)^* (1,068)$$

Berdasarkan hasil estimasi tersebut, diketahui nilai R-squared 0,830 yang berarti 83.0% variasi PDRB perkapita, upah minimum, dan inflasi dapat menjelaskan variasi perubahan tingkat kemiskinan Kabupaten Bone. Sisanya sebesar 17.0% ditentukan oleh variabel atau faktor lain di luar model.

Dari hasil regresi PDRB perkapita, upah minimum, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone tahun 2000-2017 yang menggunakan taraf keyakinan 95 persen ( $\alpha=5\%$ ) 0,05 dengan *degree of freedom for numerator* (dfn)= k-1=4-1=3 dan *degree of freedom for denominator* (dfd= n - k = 18 - 4 = 14 diperoleh f-tabel sebesar 3,3439

Dengan nilai F sebesar 22.795 dan probalitas 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa PDRB perkapita, upah minimum, dan inflasi dapat menjelaskan variasi tingkat kemiskinan Kabupaten Bone, menjelaskan presentase tingkat kemiskinan Kabupaten Bone pada taraf signifikan 5% yang berarti bahwa PDRB perkapita, upah minimum, dan inflasi bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone tahun 2000-2017. Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa f-hitung > f-tabel (22.79 > 3.34)

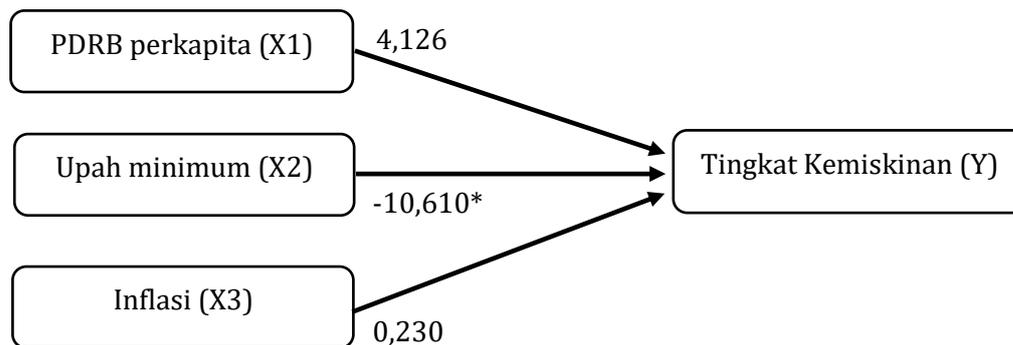
Dari hasil regresi PDRB perkapita, upah minimum, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone tahun 2000-2017 yang menggunakan taraf keyakinan 95 persen ( $\alpha=5\%$ ) 0,05, dengan *degree of freedom* (df=n-k= 18-4=14 diperoleh t-tabel sebesar 1,76131.

Pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa besarnya koefisien regresi PDRB perkapita terhadap Tingkat kemiskinan sebesar 4.126 dengan nilai probalitas 0.197 lebih besar dari taraf signifikan 5% (0.05). Jadi dapat disimpulkan bahwa PDRB perkapita tidak mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di kabupaten Bone.

Pada Tabel 10 menunjukkan bahwa besarnya koefisien regresi upah minimum terhadap Tingkat kemiskinan sebesar -10,610 dengan nilai probalitas 0.011. Hal ini

berarti jika upah minimum meningkat 1 persen maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 10,610 persen dan sebaliknya jika upah minimum turun sebesar 1% maka akan menyebabkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone meningkat sebesar 10,610. Arah hubungan antara upah minimum dengan tingkat kemiskinan adalah berpengaruh (-).

Pada Tabel 10 menunjukkan bahwa besarnya koefisien regresi inflasi terhadap Tingkat kemiskinan sebesar 0.230 dengan nilai probabilitas 0.303 lebih besar dari taraf signifikan 5% (0.05). Jadi dapat disimpulkan bahwa inflas tidak mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di kabupaten Bone.



**Gambar 1.** Hasil Estimasi Model

## **Pembahasan**

### ***Pengaruh PDRB per kapita (X<sub>1</sub>) terhadap Tingkat kemiskinan***

Berdasarkan teori PDRB perkapita, bahwa ketika PDRB perkapita naik maka tingkat kemiskinan menurun namun berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan seperti pada Tabel 7 menjelaskan bahwa PDRB perkapita tidak signifikan dan berpengaruh positif terhadap kemiskinan atau dengan kata lain meningkatnya PDRB perkapita tidak mampu mengurangi kemiskina namun sebaliknya meningkatnya PDRB perkapita akan menaikkan kemiskinan di Kabupaten Bone. Kemungkinan yang terjadi adalah walaupun masyarakat sebagian masyarakat berpendapatan namun ada sebagian orang yang belum berpendapatan karena dia masih menempuh pendidikannya atau belum cukup umur untuk bekerja.

Meskipun PDRB perkapita di Kabupaten Bone terus mengalami peningkatan setiap tahunnya namun hal itu belum cukup untuk memberi pengaruh terhadap menurunnya tingkat kemiskinan dan data yang digunakan dalam perhitungan tersebut menunjukkan bahwa hubungan yang tercipta pada dasarnya tidak dapat ditebak hasil yang diperoleh dengan hanya melihat kenaikan atau penurunan yang terjadi setiap tahunnya.

Fakta empiris menunjukkan bahwa Kabupaten Bone yang memiliki pola hubungan yang tidak selalu searah antara tingkat PDRB perkapita dan tingkat kemiskinan. Jadi

dalam kasus ini, hubungan antara PDRB perkapita dan kemiskinan tidak selalu sesuai dengan asumsi teori ekonomi yang ada, tetapi juga dapat memiliki hubungan yang terbalik.

### ***Upah Minimum ( $X_2$ )***

Berdasarkan dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa upah minimum mempunyai dampak paling besar dibanding ketiga variable bebas lainnya dalam mengurangi kemiskinan. Kenaikan upah minimum dapat mengurangi kemiskinan karena upah minimum dapat meningkatkan pendapatan dari pekerja sehingga dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan ketika pekerja tersebut termasuk dalam kategori miskin. Sebagaimana dengan teori Upah alami yang dikemukakan oleh David Ricardo Teori ini menerangkan: Upah menurut kodrat adalah upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan keluarganya sedangkan di pasar akan terdapat upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Upah harga pasar akan berubah disekitar upah menurut kodrat. Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjanya. Undang-undang upah minimum menetapkan harga terendah tenaga kerja yang harus dibayarkan. Sehingga dengan naiknya upah maka pekerja akan meningkatkan daya belinya dengan begitu kemiskinan akan menurun. Dimana Setiap Peningkatan upah minimum di Kabupaten Bone cukup untuk memberi pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone. Artinya peningkatan upah minimum dan penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bone ternyata mampu memberikan efek penurunan tingkat kemiskinan yang ada.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Musa Al Jundi (2014) yang menyatakan bahwa peningkatan Upah akan berakibat pada meningkatnya Pendapatan kerja penduduk yang akan meningkatkan daya beli. Dengan pendapatan yang meningkat akan menyebabkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya serta dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil regresi juga ditunjang dengan adanya kecenderungan kenaikan upah minimum dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahrur Romi dan Etik Umiyati (2018) yang menyatakan bahwa hasil analisis diketahui bahwa: pertumbuhan upah minimum Provinsi Jambi sebesar 14,30 persen secara simultan dan secara parsial upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Jambi. Sehingga dapat dikatakan bahwa meningkatnya Upah minimum telah mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone.

### ***Pengaruh Inflasi ( $X_3$ )***

Variabel Inflasi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone. Hal tersebut terjadi karena adanya keadaan daya beli antara golongan yang ada di masyarakat tidak sama (*heretogen*), maka selanjutnya akan terjadi realokasi barang-barang yang tersedia dari golongan masyarakat yang memiliki daya beli yang lebih besar. Kejadian ini akan terus terjadi di masyarakat. Sehingga, laju inflasi akan berhenti hanya apabila salah satu golongan masyarakat tidak bisa lagi memperoleh dana (tidak lagi

memiliki daya beli) untuk membiayai pembelian barang pada tingkat harga yang berlaku, sehingga permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan tidak lagi melebihi *supply* barang.

Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Imelia,SE.,M.Si (2012) Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 1993-2007 variabel laju inflasi ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kemiskinan di propinsi Jambi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai  $t$  hitung sebesar  $1,725 < t$  tabel pada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 yaitu sebesar 2,145 (uji dua sisi). Sehingga hipotesis yang diajukan adalah tidak benar dan tidak terbukti. Mengingat tidak signifikannya pengaruh laju inflasi terhadap kemiskinan di Propinsi Jambi. Sedangkan dari hasil penelitian Fitri Amalia (2012) Analisis menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh signifikan dengan tingkat kepercayaan 95% dari tingkat kemiskinan. Berdasarkan statistik uji  $F$ , menunjukkan bahwa inflasi secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan KTI pada tingkat kepercayaan 95%.

## **KESIMPULAN**

PDRB perkapita ternyata tidak berpengaruh dan bertanda positif terhadap tingkat kemiskinan. Dengan demikian hipotesis tidak terbukti dan ini menandakan PDRB perkapita yang meningkat belum dapat memberikan dampak penurunan tingkat kemiskinan, dimana PDRB perkapita yang tinggi akan menimbulkan ketimpangan yang semakin besar dalam pembagian yang tidak merata antara golongan atas dan golongan bawah sehingga membuat peningkatan PDRB perkapita belum dapat memberikan dampak pada penurunan tingkat kemiskinan.

Begitu pula dengan inflasi yang ternyata tidak berpengaruh dan bertanda positif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone. Dengan demikian hipotesis tidak terbukti dan ini berarti inflasi belum mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan tingkat kemiskinan meskipun trend Inflasi berfluktuasi. Sedangkan Upah minimum ternyata berpengaruh dan bertanda negatif terhadap tingkat kemiskinan yang berarti peningkatan Upah minimum ternyata memberikan efek terhadap daya beli masyarakat dan pada akhirnya masyarakat memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan konsumsinya dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.808 yang berarti sebesar 80,8 persen variasi kemiskinan Kabupaten Bone dapat dijelaskan oleh variasi tiga variable independennya yakni PDRB perkapita ( $X_1$ ), upah minimum ( $X_2$ ), dan inflasi ( $X_3$ ). Sedangkan sisanya sebesar 19.2 persen dijelaskan oleh variable lain di luar model estimasi. Penelitian ini merekomendasi Pemerintah Kabupaten Bone lebih mendorong sektor-sektor yang lebih memberikan efek penurunan tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Bone dan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan yang tinggi namun juga memperhatikan sektor-sektor lain, agar tidak terjadi ketimpangan yang menyebabkan beberapa daerah menjadi tertinggal sedangkan daerah lain terus mengalami kemajuan. Dengan Hasil tersebut diharapkan

pemerintah Kabupaten Bone senantiasa menaikkan upah minimum dan menciptakan lapangan kerja masyarakat agar kesejahteraan bisa merata dan akhirnya akan menurunkan angka kemiskinan. Meskipun Inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan namun pemerintah harus tetap mengontrol dan menjaga tingkat inflasi agar kenaikan harga barang-barang terutama barang kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan harga yang tinggi.

## REFERENSI

- Apriliyah, S. Napitupulu. (2007) "Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan manusia terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara" <https://www.google.co.id>. Diakses pada tanggal 26 November 2018.
- Baswir, Revrison. (1997) Akuntansi Pemerintahan Indonesia. BPFE: Yogyakarta.
- Boediono. (1982). Pengantar Ilmu Ekonomi No.2, Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPPE
- Boediono. (1985) Teori Pertumbuhan Ekonomi. Penerbit BPFE: Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistika (2018). Kabupaten Bone dalam angka. Diambil dari: <https://bonekab.bps.go.id/>. Diakses pada 3 November 2018
- Chambers, Robert. (1983) Rural Development putting the Lass First. London: Routledge.
- Ernawati. (2012) Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Tentang Diare pada Anak Jalanan Semarang. Karya Tulis Ilmiah. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Fernandez, Ricardo. (2001) Mutu terpadu dalam Pembelian Dan Pemasok. Jakarta: PT.Pustaka Binaman Presindo.
- Ginting, Charisma Kuriata, Lubis, Mahalli, (2008) Pembangunan Manusia Di Indonesia Dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhinya. Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah, 4(1)
- Gunawan, Sumodiningrat. (1998) Membangun Perekonomian rakyat. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Hadibroto, S. (1975) Perkiraan Pendapatan Regional (Regional Income) Propinsi Sumatera Utara 1969-1973. BAPPEDA SUMUT LPPM Fak. Ekonomi USU. Medan.
- Hartini, Nita Tri. (2017) Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi Dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2011-2015. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, 6(6):530-539
- Hasan, M. Iqbal. (2001) Pokok-pokok Materi Statistik 2. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Jundi, Al Musa. (2014) Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi- Provinsi Di Indonesia. Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.

**Development Policy and Management Review (DPMR).**

Bahar J. et al. Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Daerah Kabupaten.

- Kartasasmita, Ginanjar.(1996) Pembangunan untuk rakyat memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Kaufman, Bruce. (2000) The Economics of Labor Markets, Fifth Edition, The Dryden Press, New York.
- Lanjouw, P, (2001) Poverty Education and Health in Indonesia : Who Benefits From Public Spending. Word Bank Working Paper No. 2739; WashingtonDC.
- Mahsunah, Durrotul. (2013) Analisis jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi,Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- Mudrajat, Kuncoro. (2003) Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, G. (2003). Teori Makroekonom. Jakarta: Erlangga.
- Muana, Nanga, (2001) Makro Ekonomi, Masalah dan Kebijakan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasir, M. Muh, Saichudin dan Maulizar. (2008) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Purworejo. Jurnal Eksekutif. 5(4)
- Nopirin. (1987) Ekonomi Moneter Buku Dua. Yogyakarta: BPFPE.
- Pohan, Aulia. (2008) Ekonomi Moneter. Buku II. Edisi 1.Cetakan kesepuluh. BPFPE UGM: Yogyakarta.
- Rachman, Hasanuddin, (2005), Pengaruh Pengupahan Sebagai langkah Strategis Stabilitas Dalam Hubungan Industrial. Jakarta.
- Ravallion,M. (2001) Growth,Inequality and Proverty: Looking beyond Averages. policy Research working Paper 2558. The World Bank
- Republik Indonesia. (1999) Peraturan Menteri tentang Upah Minimum. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik Indonesia. (2003) Undang-Undang Upah Minimum. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Riva, Vinny Alvionita, Kadir, Hanim, Setiawan, Deny (2014) Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau. Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ekonomi, 1(2)
- Samuelson, Paul A dan Nordhaus, William D,(2004) Ilmu Makro Ekonomi.Jakarta PT. Media Edukasi.
- Saputri, Patrisia Marika Mega. (2014) Ekspektasi Makroekonomi Indonesia Pada Krisis Keuangan Global Periode 1998-2013 Dengan Menggunakan Pendekatan Logika Fuzzy Mamdani. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

- Setiadi, Elly M. dan Kolip, Usman. (2011) Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sitepu, Rasidin Karo Karo, Sinaga, Bonar M, Oktaviani, Rina dan Tambunan, Mangara. (2009) Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia. Forum Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 32 (2): 117-118.
- Subandi. (2011) Ekonomi Pembangunan. Bandung: Alfa beta
- Sumitro, Djojohadikusumo (1995) Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan Dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta: LP3ES
- Suryawati, Chriswardani. (2005) Mahami Kemiskinan Secara Multidimensional. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Tarigan, Robinson. (2005) Ekonomi Regional; Teori dan Aplikasi. Jakarta: Bumi aksara.
- Todaro, Michael. (2003) Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Buku 1 dan 2 Edisi Kedelapan. Jakarta; Erlangga.
- Todaro, M dan Smith S (2006) Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan: Terjemahan Bahasa Indonesia. Pearson Education Limited dan Erlangga.
- United Nation Development Programme (UNDP).(1995). The State of Human Development. New York: UNDP
- Yusuf A. Muri. (2014) Metode Penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Edisi Pertama. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Wirawan, I Made Tony dan Arka, Sudarsana. (2015) Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Per kapita dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan 4(5): 348-607
- Widodo, Adi, Waridin, Waridin, Koodatie, J.Maria (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan. 1(1): 25-42